

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

OLEH CAMAT ILE BURA



KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BURA
LEWOTOBI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ile Bura tentunya tidak terlepas dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebagai dasar hukum pembentukan Kabupaten Flores Timur, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.66/1/32 Tahun 1963 tentang Kecamatan dalam Daerah Swatantra Tingkat II se-Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Adonara

B. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. *Kondisi Geografis Daerah*

Kecamatan Ile Bura merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk pada tahun 2007, dengan topografi bergunung dan berbukit dengan kemiringan yang lebih dominan < 500 m DPL, dengan musim hujan ± 3 bulan dan musim kemarau 9 bulan membawa kendala tersendiri. Selain itu, seiring dengan perubahan iklim global, pergantian musim menjadi tidak menentu dan anomali cuaca yang sulit diprediksi, membawa implikasi tersendiri terhadap berbagai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ile Bura ini.

Luas wilayah Kecamatan Ile Bura adalah : 48,53 Km² dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

U t a r a : Kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur
 S e l a t a n : Selat Lewotobi
 T i m u r : Kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur
 B a r a t : Kecamatan Wulanggitang- Kabupaten Flores Timur

Luas wilayah per desa dan tinggi rata-rata dari permukaan laut seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 1.1				
Luas Wilayah Per Desa dan Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut				
No.	Nama Desa	Luas Desa (Km ²)	Tinggi Rata-rata DPL (m)	Persentasi Terhadap Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Nobo	2,75	100	5,67
2.	Nurabelen	8,45	100	17,41
3.	Riang Rita	3,85	100	7,93
4.	Lewotobi	9,15	100	18,85
5.	Lewoawang	10,25	100	21,12
6.	Riangbaring	8,26	300	17,02
7.	Dulipali	5,82	1200	11,99
Jumlah		48,53		100,00

Sumber : Profil Kecamatan Ile Bura dalam Angka

Tabel 1.2						
Tanah yang Bersertifikat dan yang Belum Bersertifikat						
No.	Nama Desa	Luas (Ha)	Jumlah Bidang Tanah	Yang Bersertifikat	Yang Belum Bersertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nobo					
2.	Nurabelen	1.139	1.757	1.757	0	desa lengkap sertifikat
3.	Riang Rita					
4.	Lewotobi	1.205	1.222	1.040	182	target lengkap sertifikat
5.	Lewoawang					
6.	Riangbaring	121	458	200	258	
7.	Dulipali					
Jumlah		2.465	3.437	2.997	440	
Sumber : Laporan dari desa.						

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari ke-7 desa dalam wilayah Kecamatan Ile Bura yang telah menjadi desa/kelurahan lengkap sertifikat adalah Desa Nurabelen; dari 1.757 bidang tanah, telah dilakukan sertifikasi sebesar 1.757 bidang atau 100% sertifikat tanah, dan Desa Lewotobi dari 1.222 bidang tanah, yang telah bersertifikat mencapai 1.040 bidang atau 85,11%. Sedangkan desa Riangbaring dari 458 bidang tanah yang telah disertifikatkan sebanyak 200 bidang, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 258 bidang dan untuk 4 desa yang lain belum dilakukan pemetaan dan sertifikasi.

2. *Gambaran Umum Demografis*

Sebaran penduduk Kecamatan Ile Bura sampai 31 Desember 2019, tercatat mencapai 8.057 jiwa, dengan rincian sebagai berikut : Laki-laki sebanyak 4.050 jiwa atau 50,26% dan Perempuan sebanyak 4.007 jiwa atau 49,73%. Sedangkan desa dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Desa Lewotobi sebanyak 1.680 jiwa atau 20,85%, disusul Desa Nobo sebanyak 1.583 jiwa atau 19,64% dan Desa Lewoawang sebanyak 1.448 jiwa atau 17,97%. Sedangkan sebaran penduduk terendah adalah Desa Riang Rita sebanyak 680 jiwa atau 8,43%, disusul Desa Dulipali sebanyak 815 jiwa atau 10,11%.

Tabel 1.3					
Jumlah Penduduk Kecamatan Ile Bura per Desa Tahun 2019					
No.	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1.	Nobo	381	812	771	1.583
2.	Nurabelen	235	461	453	914
3.	Riang Rita	167	345	335	680
4.	Lewotobi	438	838	842	1.680
5.	Lewoawang	374	733	715	1.448
6.	Riangbaring	246	476	461	937
7.	Dulipali	206	385	430	815
Jumlah		2.047	4.050	4.007	8.057

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Flotim 2019

☞ Adapun luas menurut penggunaan Tanah :

- a. Luas Pekarangan & Bangunan : 78,25 Ha
- b. Luas tanah Bukan Lahan Sawah :
 - . Lahan Kering : 2.704,00 Ha
 - . Lainnya : 1.149,00 Ha
- c. Tegal/ Kebun/ladang : 1.806,00 Ha
- d. Padang Rumput : 400,00 Ha
- e. Perkebunan rakyat : 1.267,00 Ha
- f. Perkebunan Swasta : 260 Ha
- g. Perkebunan Negara : -
- h. Tanah kayu-kayuan : 5.400 Ha
- i. Tanah yang belum digunakan : 862 Ha
- j. Luas tanah tandus / kritis : 2.704 Ha
- k. Luas tanah hutan : 10.378 ha

☞ Topografi :

- a. Tanah perbukitan : 60 %.
- b. Tanah lembah : 40 %.
- c. Luas tanah hutan : 10.378 ha.

☞ Gunung Api.

Terkait Gunung Api aktif terdiri atas Gunung Lewotobi Laki – Laki dengan tinggi 1.470 m, dan Lewotobi Perempuan dengan tinggi 1.663 m. keadaan topografi tersebut menyebabkan sering terjadinya bencana alam berupa tanah longsor, banjir dan gempa bumi.

a. Mata Pencaharian.

Penduduk di Kecamatan Ile Bura 80 % bermata pencaharian bertani, mengelola kebun dan ladang. Di samping bertani ada pula yang berprofesi sebagai buruh, Tukang, PNS – Swasta, Guru dan Ojek.

3. *Kondisi Ekonomi*

❖ **Sektor Pertanian**

Kecamatan Ile Bura memiliki areal lahan pertanian seluas 1.849 Ha yang merupakan lahan kering atau 0,38% dan sisanya 13.644 Ha atau 99,62% merupakan lahan tidur dan hutan tutupan. Sehubungan dengan kondisi alam tersebut, pada tahun 2019, Kecamatan Ile Bura memproduksi komoditas tanaman pangan sebagai berikut : *Padi 2.100 ton, Jagung 33.570 ton* dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4				
Luas Panen Tanaman Pangan di Kecamatan Ile Bura				
No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (kw/ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5
1.	Padi / <i>Paddy</i>	136	21	2.100
2.	Jagung / <i>Maize</i>	461	33,57	33.570
3.	Ubi Kayu / <i>Cassava</i>	-	-	-
4.	Ubi Jalar / <i>Sweet Potatoes</i>	-	-	-
5.	Kacang Tanah / <i>Peanuts</i>	-	-	-
6.	Kacang Hijau / <i>Green Peas</i>	-	-	-
7	Sorgum / <i>Shorgom</i>	-	-	-

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2017

❖ **Peternakan**

Sektor peternakan di Kecamatan Ile Bura pada umumnya dipandang sebagai usaha rumah tangga atau sampingan, karena masyarakat Ile Bura merupakan masyarakat agraris atau petani, sehingga ternak besar, kecil, dan unggas belum diusahakan secara maksimal. Hanya ternak babi dan kambing yang menonjol, karena kedua jenis ternak ini merupakan ternak untuk kebutuhan seremonial adat dan urusan adat lainnya. Jumlah masing-masing secara kecamatan rata-rata babi mencaapai 141 ekor dan kambing mencapai 117 ekor. Ayam mencapai 2.108 ekor dan sapi mencapai 15 ekor. Dalam beberapa tahun terakhir, populasi babi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Kecamatan Ile Bura karena adanya bantuan program dari

Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui misi “*Selamatkan Orang Muda Flores Timur.*”

Tabel 1.5		
Populasi Menurut Jenis Ternak		
No.	Jenis Ternak	Jumlah Populasi
1	2	3
1.	Sapi	15
2.	Kerbau	-
3.	Kuda	1
4.	Kambing	117
5.	Domba	-
6.	Babi	141
7.	Ayam Kampung	2.108
8.	Itik	-

Sumber : Data Sekunder BPP Lewotobi 2019

❖ Perkebunan

Luas areal dan produksi perkebunan menurut jenis komoditi memberikan gambaran bahwa komoditi perkebunan yang menonjol atau andalan di Kecamatan Ile Bura sepanjang tahun 2018 adalah *Jambu Mete* dengan produksi sebanyak 1.020,12 ton, *Kelapa* dengan produksi 438,69 ton, *Kemiri* dengan jumlah produksi 89,00 ton dan *Kakao* dengan produksi 74,45 ton, serta komoditi lainnya yang mendukung pertumbuhan perkapita masyarakat secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6		
Produksi Perkebunan Menurut Jenis Komoditi		
No.	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (ton)
1	2	3
1.	Kelapa	438,69
2.	Kopi	-
3.	Cengkeh	-
4.	Kakao / Coklat	74,45
5.	Jambu Mete	1.020,12
6.	Kemiri	89,00
7.	Pala	1,46
8.	Lada	-
9.	Vanili	2,33
10.	Kapuk	3,11
11.	Tembakau	-
12.	Jarak Pagar	0,47
13.	Pinang	13,24

Sumber : Kecamatan Ile Bura Dalam Angka 2017

❖ Perikanan

Wilayah perairan Kecamatan Ile Bura sangat berpotensi untuk dikembangkan dan mempunyai prospek yang baik bagi pasar dalam daerah maupun luar daerah. Ditinjau dari aspek geografis, Kecamatan Ile Bura memiliki garis pantai yang panjang dan jumlah desa pantai sebanyak 7 desa dengan jumlah Rumah Tangga usaha perikanan sebanyak 127 Rumah Tangga. Untuk memperoleh hasil tangkapan yang optimal harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Pada tabel berikut, dipaparkan jumlah perahu / kapal penangkap ikan serta alat tangkap yang digunakan :

Tabel 1.7		
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan dan Jumlah Alat Tangkap Ikan		
No.	Jenis Kapal / Alat Tangkap	Jumlah
1	2	3
1.	Sampan / Jukung	59
2.	Perahu Papan	23
3.	Motor Tempel	23
4.	Kapal Motor < 5 GT dan > 5 GT	12
5.	Tanpa Perahu	-

Sumber : Kecamatan Ile Bura Dalam Angka 2017

Sedangkan luas lahan potensial untuk usaha budidaya perikanan laut \pm 1.240 Ha, terdapat pada beberapa perairan pesisir dan teluk yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya *mutiara*, *rumpun laut*, *ikan kerapu* dan

baronang, teripang serta kepiting. Dengan mencermati potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kecamatan Ile Bura, maka dapat diketahui hasil atau produksi laut sebagai berikut : *Lencana : 27 Kg, Kuwe : 21 Kg, dan Kerapu : 20 Kg dan Tembang : 15 Kg*. Produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut :

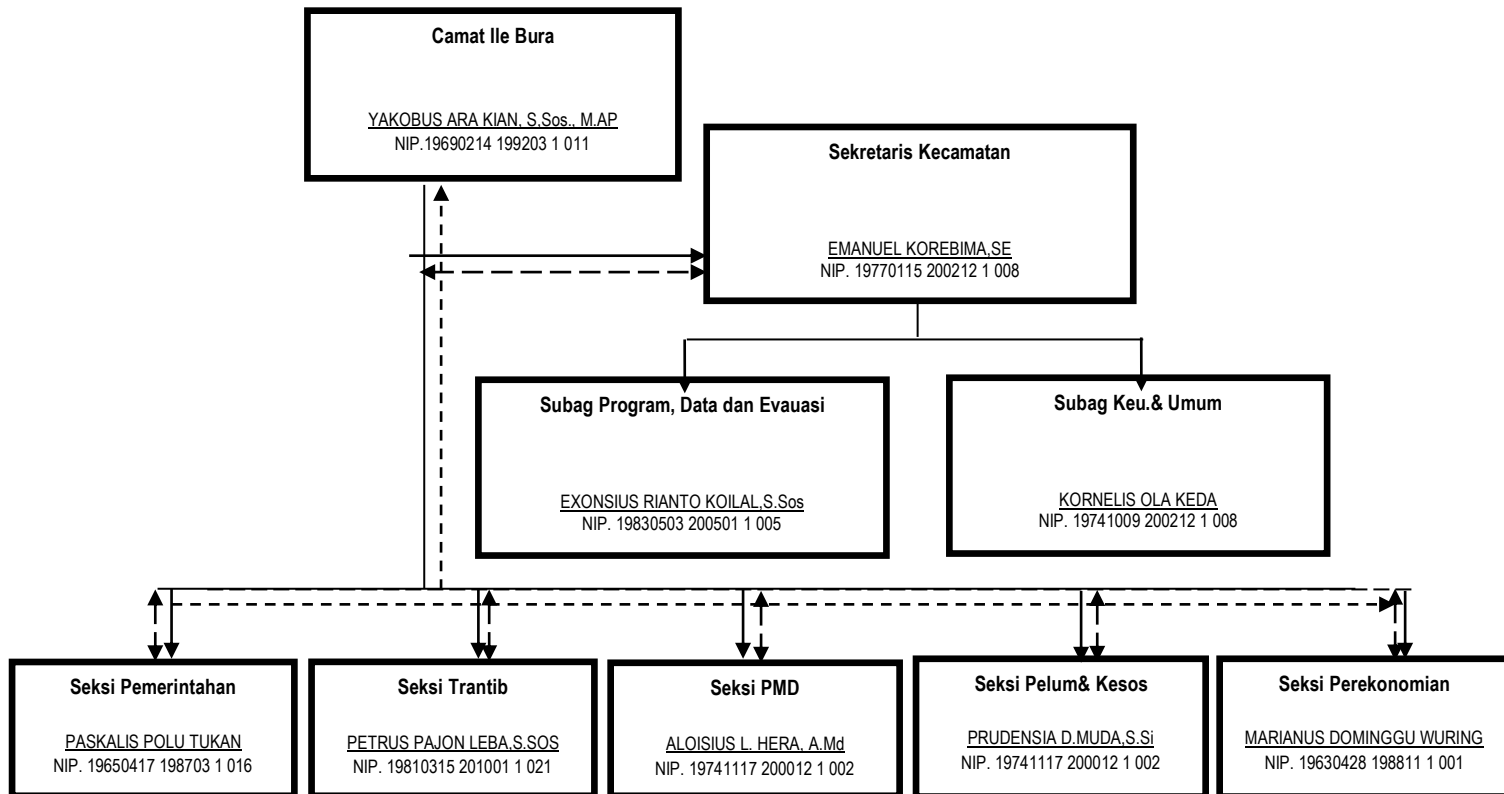
Tabel 1.8		
Hasil Produksi Perikanan Laut		
No.	Jenis Komoditas	Jumlah Produksi (ton)
1	2	3
1.	Kakap	7
2.	Kakatua	3
3.	Kerapu	20
4.	Kuwe	21
5.	Kuris	7
6.	Swanggi	5
7.	Selar	7
8.	Tembang	15
9.	Julung-julung	2
10.	Lencana	27
11.	Cendro	3
12.	Kembung	-
13.	Kome	-
14.	Biji Nangka	2
15.	Pari	-
16.	Tenggiri	1
17.	Layang	6
18.	Tuna / Cakalang	-
19	Tongkol	20

Sumber : Kecamatan Ile Bura Dalam Angka Tahun 2017

4. Organisasi Kecamatan dan Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016. Tata kelola pemerintahan Kecamatan Ile Bura dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu seorang Sekretaris, 5 orang Kepala Seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 4 staf pelaksana. Di samping itu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Ile Bura dibantu oleh 5 orang tenaga kontrak.

Adapun Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Bura sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Sumber Daya Aparatur dalam Jabatan Struktural SKPD Kecamatan Ile Bura dapat dilihat dalam Tabel 2. Di bawah ini.

Tabel 1.9.

Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura berdasarkan Jabatan Tahun 2019

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	5 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			9 orang

Sumber :Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2019.

Tabel 1.10.

Keadaan PNS Menurut Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Penata Tingkat I	III/d	3 orang
4.	Penata	III/c	2 orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 orang
6.	Penata Muda	III/a	2 orang
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	-
8.	Pengatur	II/c	4 orang
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
10.	Pengatur Muda	II/a	-
11.	Juru Tingkat I	I/d	-
12.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
13.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			14 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2019.

Tabel 1.11.

Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	4 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	1 orang
4.	Diploma I/Diploma II	0 orang
5.	SLTA	8 orang
6.	SLTP	0 orang
7.	SD	0 orang
JUMLAH		14 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2019.

Tabel 1.12.

Keadaan PNS Menurut Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	0 orang
2.	PIM III / SPAMA	1 orang
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	2 orang
JUMLAH		3 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2019.

Keadaan Tenaga Honorer Kecamatan Tahun 2019 berjumlah : 5 (Lima) orang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Visi (*Tidak ada*)B. Misi (*Tidak ada*)

BAB III

URUSAN KONKRUEN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. OPD Pelaksana

NO	NAMA SKPD	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	
		WAJIB	PILIHAN
1	Kantor Camat Ile Bura	1. Fungsi Penunjang Prioritas	-

2. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
2. Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan kemasyarakatan

3. Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

3. Tingkat Pencapaian SPM

Pencapaian kinerja belum diukur berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal sehingga didasarkan pada capaian program dan kegiatan (outcome) seperti tersebut diatas.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Ile Bura yang melaksanakan sebagian Urusan Wajib Fungsi Penunjang Prioritas berjumlah 14 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- 1) Magister : 1 orang
- 2) Sarjana : 4 orang
- 3) Diploma : 1 orang
- 4) SMA : 8 orang
- 5) SMP : - orang
- 6) SD : - orang

b. Berdasarkan Golongan

- 1) IV : 1 orang
- 2) III : 9 orang
- 3) II : 4 orang
- 4) I : - orang

c. Berdasarkan Jabatan

- 1) Pejabat Struktural : 9 orang
- 2) Fungsional : - orang

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

<i>Target</i>	:	Rp 2.340.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 2.340.000				
<i>Prosentase</i>	:	100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya meterai.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya urusan administrasi surat menyurat, optimalisasi koordinasi vertikal demi sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan.				

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

<i>Target</i>	:	Rp 18.468.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 18.468.000				
<i>Prosentase</i>	:	100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya pulsa, air bersih dan listrik/penerangan.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya koordinasi pemerintahan, terpenuhinya kebutuhan akan air bersih dan penerangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional.

<i>Target</i>	:	Rp 1.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 500.000				
<i>Prosentase</i>	:	50%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dokumen perizinan untuk kendaraan dinas roda 2				
<i>Outcome</i>	:	Kenyamanan pelayanan bagi masyarakat dan kebutuhan koordinasi				

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

<i>Target</i>	:	Rp 17.455.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 17.400.000				
<i>Prosentase</i>	:	99,68%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya honorarium bagi Satuan Perangkat Pemegang Kas				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya pengelolaan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan.				

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

<i>Target</i>	:	Rp 3.780.425				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 3.780.425				
<i>Prosentase</i>	:	100%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.				

6. Penyediaan alat tulis kantor.

<i>Target</i>	:	Rp 27.524.325				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 27.524.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai.				
<i>Outcome</i>	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang optimal.				

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

<i>Target</i>	:	Rp 12.193.500				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 12.193.500				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk penggandaan dan penjiilidan.				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya dokumen administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.				

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan.

<i>Target</i>	:	Rp 2.913.750				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 2.913.750				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya instalasi listrik gedung kantor yang baik.				
<i>Outcome</i>	:	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

<i>Target</i>	:	Rp 23.600.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 23.600.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya anggaran makanan dan minuman rapat dan tamu dinas.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya sinergisitas sistem koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.				

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

<i>Target</i>	:	Rp 77.175.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 77.175.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana operasional pendukung.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi vertikal dan horisontal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

11. Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran

<i>Target</i>	:	Rp 69.110.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 69.089.330				
<i>Prosentase</i>	:	99,97%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk membiayai tenaga pendukung dan teknis perkantoran.				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.				

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

<i>Target</i>	:	Rp 8.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 8.000.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya meubelair dan peralatan rumah tangga kantor.				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

<i>Target</i>	:	Rp 34.800.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 34.800.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya sound system dan personal komputer serta printer kantor				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

<i>Target</i>	:	Rp 4.027.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 4.027.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Terpeliharanya bangunan gedung kantor.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya situasi kerja yang kondusif bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.				

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

<i>Target</i>	: Rp 16.730.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 16.730.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya biaya servis kendaraan dan BBM				
<i>Outcome</i>	: Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas kantor dan operasional perkantoran.				

c. Program koordinasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat

1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

<i>Target</i>	: Rp 35.642.875				
<i>Realisasi</i>	: Rp 35.642.875				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG RKPD Kab. di Kec.				
<i>Outcome</i>	: Tersedianya dokumen usulan perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan.				

2. Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan kemasyarakatan

<i>Target</i>	: Rp 23.000.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 23.000.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya honorarium bagi FORKOPINCAM.				
<i>Outcome</i>	: Terlaksananya koordinasi untuk menjamin kamtibmas Tingkat Kecamatan.				

3. Pendampingan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

<i>Target</i>	: Rp 23.640.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 23.640.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya dana monitoring Pengelolaan Keuangan desa				
<i>Outcome</i>	: Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan oleh desa				

7. Proses Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan dimulai pada Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Proses perencanaan di tingkat Dusun lebih bersifat penggalian gagasan dalam artian mengumpulkan data/informasi dan menampung berbagai usulan masyarakat pada masing-masing dusun untuk diteruskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Proses, mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan yang dijalankan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan dasar ini maka, prinsip-prinsip proses perencanaan perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh agar dapat mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat. Prinsip-prinsip yang dikedepankan adalah Pemberdayaan, Partisipatif, keberpihakan kepada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien, efektif dan keberlanjutan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas, proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Ile Bura adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahun Ketiga, yaitu Tahun 2019 yang meliputi Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Ile Bura untuk tahun 2017 s/d 2022. Rencana Kerja tahunan disusun oleh masing-masing Seksi dan sekretariat untuk dijadikan Pedoman Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Ile Bura.
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun berikutnya dengan proses sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan kegiatan tahun ketiga dalam RPJM Kecamatan.
 - b. Melakukan kajian terhadap masalah dan potensi yang ada untuk diajukan dengan mempertimbangkan aspek kemendesakkan.
 - c. Penyusunan potensi usulan sesuai urusan/kewenangan yang diberikan untuk mendapat pertimbangan dan dukungan dana dari Bupati Flores Timur.
3. Perencanaan pembangunan kecamatan dilaksanakan dengan berpedoman pada usulan kebutuhan masyarakat desa. Hal yang terpenting dalam penentuan prioritas usulan masyarakat adalah manfaat usulan yang berbasis kawasan. Prioritas kebutuhan masyarakat dari masing-masing desa diperjuangkan lagi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur di Kecamatan.

8. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Ile Bura yang tersedia memadai sangat membantu aktivitas pelayanan yang cepat, tepat dan memadai. Secara umum, kondisi sarana prasarana kantor tidak atau kurang memadai karena kondisi bangunan gedung yang kecil dengan ketersediaan ruangan kerja aparatur yang tidak memberikan kenyamanan dalam bekerja (*ruangan kerja sangat kecil dan ditempati oleh lebih dari 3 orang aparatur*). Kondisi sarana dan prasarana pendukung berupa : tanah, gedung kantor dan sarana penunjang lainnya dapat dirinci sebagaimana terlihat dalam lampiran.

9. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Camat Ile Bura masih terdapat permasalahan/issu yang dihadapi, yang dapat diinventarisir sebagai berikut :

1. PERMASALAHAN INTERNAL PEMERINTAH

• Masalah

- ☞ Aparatur belum sepenuhnya memahami uraian tugas yang diimplementasikan dalam uraian-uraian kegiatan untuk memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Kantor Camat.
- ☞ Sistem pengarsipan dokumen yang belum memenuhi standard pengarsipan yang sesungguhnya. Banyak dokumen masih diarsipkan secara manual oleh masing-masing seksi.
- ☞ Masing-masing seksi belum secara maksimal membentuk Standard Operasional Prosedural yang sistematis untuk dijadikan pedoman pelayanan di Kantor Camat Ile Bura. Hal ini terjadi karena aparatur belum mendapat petunjuk dan bimbingan teknis terkait penyusunan SOP secara berkala/memadai.
- ☞ Minimnya ketersediaan fasilitas sarana prasarana kerja pendukung operasional perkantoran, berupa :
 - Kendaraan roda dua (sepeda motor)
 - Perangkat lunak (laptop)
 - Akses sinyal selular dan internet yang sangat lemah
 - Belum tersedianya bangunan ruang rapat umum / aula.
- ☞ Kekurangan tenaga teknis pendukung administrasi perkantoran.

• Solusi/Jalan Keluar.

- ☞ Kecamatan diperlakukan sebagai OPD sebagaimana pada lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- ☞ Alokasi anggaran untuk Kecamatan Ile Bura dapat dinaikan dengan pertimbangan tersendiri, karena Kecamatan dengan kondisi topografi yang berbukitan sehingga dukungan fasilitas jalan belum memadai yang akan mempengaruhi volume kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan termasuk pelayanan kepada masyarakat di 7 desa.
- ☞ Setiap Kepala Seksi diwajibkan membuat Rencana Kerja dan masing-masing staf membuat uraian kegiatan untuk mengukur beban kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing pegawai/aparatur.
- ☞ Mewajibkan semua Kepala Seksi untuk membenah sistem pengarsipan, tata kelola administrasi seksi dan pembentukan SOP sesuai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing seksi.
- ☞ Untuk mengatasi kekurangan tenaga teknis administrasi perkantoran maka diangkat tenaga honorer dan diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh tenaga organis / PNS. Namun demikian, kondisi ini sangatlah riskan karena tanggungjawab sebagai tenaga honorer sangatlah lemah dan kurang.

2. PERMASALAHAN EKSTERNAL PEMERINTAH

1. Masalah Hutan Adat Lewo di Desa Riangbaring

- Masalah
 - ❖ Tahun 2013, Bartolomeus Baba Leba, dkk melakukan kegiatan penebangan pohon dan pembersihan lokasi mengakibatkan kerusakan hutan. Dengan Alasan : Lokasi yang dibuka merupakan lokasi kampung lama.
 - ❖ Sudah dilakukan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Desa pada Tahun 2013.
Berita Acara Hasil kesepakatan : Tidak boleh melakukan kegiatan lanjutan pada lokasi Hutan Adat Lewo, Lokasi yang sudah rusak dibiarkan untuk menjadi hutan kembali, akan dilakukan Seremoni Adat untuk pemulihan kembali Hutan Adat yang telah rusak

- ❖ Tanggal 26 Pebruari 2019, laporan dari Tuan Tanah Suku Leba Patilian dan Penguasa Hutan Adat (Suku Kwuta) tentang aktifitas di lokasi hutan adat (pengembalaan ternak kambing dan pembersihan).
- Langkah Penyelesaian
 - ❖ Tanggal 27 Pebruari 2019, Camat Ile Bura dan Kapospol Ile Bura, Pemerintah Desa, Tuan Tanah Suku Leba Patilian, Penguasa Hutan Adat (Suku Kwuta) bersepakat agar segera dilakukan peninjauan lokasi.
 - ❖ Tanggal 28 Pebruari 2019, Kasi Trantib Umum, Kapospol Ile Bura, Pemerintah Desa dan Tuan Tanah melakukan peninjauan lokasi.
Hasil Tinjauan : lokasi yang dibersihkan berukuran 21 x 26m dan terdapat beberapa pohon pisang yang baru ditanam.
 - ❖ Tanggal 05 Maret 2019, Camat Ile Bura, Kapospol Ile Bura, Kasi Trantib melakukan fasilitasi penyelesaian Hutan Adat Lewo.

Berita Acara Hasil kesepakatan :

1. Menginventarisir semua Hutan Adat yang ada di dalam Wilayah Desa Riangbaring.
2. Melakukan penetapan batas Hutan Adat dan ditutup.
3. Tidak diperkenankan siapapun dan dengan alasan apapun menebang, memungut hasil, memotong pohon pisang dan bambu di dalam Hutan Adat Lewo.
4. Pohon pisang, bambu, kemiri, mente, kakao, kopi, Pohon komoditi lainnya dan pohon buah - buahan yang ada di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dijadikan pohon hutan.
5. Tidak boleh melakukan penanaman pohon pisang, kemiri, mente, kakao, kopi, pohon komoditi lainnya dan pohon buah-buahan di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dan Hutan Adat lainnya.
6. Tidak boleh mengikat atau menggembalakan hewan ternak di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dan Hutan Adat lainnya.

7. Kegiatan yang berkaitan dengan Seremonial Adat pada lokasi Hutan Adat agar terlebih dahulunya disampaikan kepada Tuan Tanah, Penguasa Hutan Adat, Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BPD untuk diketahui.
 8. Penghijauan kembali Hutan Adat yang rusak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama.
 9. Membangun kembali Rumah Adat pada tempatnya semula.
 10. Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Adat agar segera melakukan rapat bersama dengan masyarakat untuk menyampaikan hasil kesepakatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hutan Adat Lewo dan membahas tentang Sangsi Adat dan Sangsi Pemerintah terhadap pelanggaran Hutan Adat yang ada di Wilayah Desa Riangbaring.
 11. Sangsi Adat ditetapkan oleh Lembaga Adat dan Sangsi Pemerintah akan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
 12. Apabila terdapat pelanggaran pada lokasi Hutan Adat maka akan dikenakan Sangsi Adat dan Sangsi Pemerintah.
-
2. Masalah Tanah Suku Leba Demonlapan di Lokasi SDK Riangbaring
 1. Penyelesaian di Tingkat Desa pada Bulan Desember 2019 yang difasilitasi oleh Camat Ile Bura bersama Pemerintah Desa Riangbaring.
 2. Berita Acara penyelesaian :

Tanah Suku Leba diserahkan secara keseluruhan kepada Pemerintah Desa dengan catatan bahwa sebagian diserahkan ke SDK Riangbaring dan sebagian menjadi milik Desa.

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Hal – hal yang juga perlu diperhatikan dan menjadi substansi dasar dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah di Kecamatan Ile Bura adalah membangun

koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam mendukung berbagai program/kegiatan yang turun ke desa dari pemerintah, pemerintah propinsi maupun sector-sektor pesemakmuran pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Koordinasi sebagaimana dimaksud adalah :

1. Forum Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan bersifat langsung dan terarah kepada Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam kaitan dengan penyebaran program/kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Ile Bura. Di Kecamatan di kenal dengan Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM), yang mana secara teknis dilakukan oleh Camat, Kapospol dan Babinsa Ile Bura serta dibantu oleh Sekretariat FORKOPIMCAM yang anggotanya terdiri dari para Kepala-kepala Seksi dan Kepala UPTD se Kecamatan Ile Bura.

2. Materi Koordinasi

- Penyelesaian Konflik wilayah perbatasan antar desa dalam wilayah kecamatan maupun antar kecamatan.
- Penebangan/pengrusakan hutan
- pemboman liar di wilayah perairan sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Ile Bura
- Penertiban SITU-SIUP
- Penyelenggaraan pemerintahan desa
- Masalah kesehatan masyarakat
- Peredaran/penjualan obat dan makanan
- Keuangan dan perpajakan
- Pemantauan pengelolaan dana Gerbang Emas
- Pemantauan pengelolaan dana Anggur Merah

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat

- DP4D, DPMD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan Umum, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM
- Badan Pertanahan Nasional
- Kapolres Flores Timur
- KODIM Larantuka

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan koordinasi ini bersumber pada APBD Kabupaten Flores Timur dalam DPA Kantor Camat Ile Bura dengan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi pelayanan Kemasyarakatan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Yang menyelenggarakan koordinasi adalah Kantor Camat Ile Bura dengan dinas, badan, kantor, bagian dan instansi lainnya sehubungan dengan masalah-masalah aktual yang timbul dan atau koordinasi program dan kegiatan yang bermuara pada masyarakat pedesaan yang berada di wilayah kecamatan. Terkait dengan hal ini, maka etika koordinasi selalu bersifat terpusat dan langsung pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Flores Timur. Hal ini didasarkan pada posisi kecamatan sebagai lembaga/instansi yang menjalankan kewenangan yang diberikan bupati.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

(lihat kondisi aparatur Kantor Camat Ile Bura pada Bab I)

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan

- a. Koordinasi dengan Kapospol dan Babinsa terkait kejadian pembakaran hutan lereng Gunung Lewotobi
- b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dengan melakukan monitoring, pendampingan dan mengawal pelaksanaan Pilkades Serentak pada 4 desa, yakni Desa Nobo, Desa Nurabelen, Desa Birawan dan Desa Riangbaring.
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu : ADD, BPD, Perangkat Desa, Keuangan Desa, Administrasi Desa.
- d. Koordinasi pelaksanaan KIA, penyuluhan kesehatan masyarakat dengan dinas kesehatan
- e. Koordinasi terkait pengamanan peredaran/penjualan obat dan makanan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Konsultasi terkait keuangan dan perpajakan dengan Badan Keuangan Daerah

g. Koordinasi pelaksanaan program Gerbang Emas dan Anggur Merah dengan DP4D dan DPMD

h. Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan DP4D

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

a. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang menjamin keberlangsungan proses pelaksanaan pembangunan di desa-desa dari program/kegiatan SKPD dan atau hasil prakarsa masyarakat.

b. Terbangunnya kesamaan persepsi dalam menterjemahkan program/kegiatan pembangunan terkait peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengimplementasikan program/kegiatan pemerintah bagi masyarakat di desa.

c. Semua elemen pembangunan dan unsure terkait dalam tanggungjawabnya sebagai subyek pelaksana pembangunan, mengetahui tugas dan tanggungjawabnya dalam kerangka pembangunan sesuai visi – misi Kabupaten Flores Timur.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Mengamankan semua keputusan atau kesepakatan bersama terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kecamatan dalam kerangka pembangunan regional yang partisipatif dan berkesinambungan.

B. Pembinaan Batas Wilayah

(*Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak ada*).

C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

(*tidak ada bencana yang terjadi*)

D. Pengelolaan Kawasan Khusus

(*tidak ada pengelolaan kawasan khusus*)

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkhis, Sapatisme atau lainnya)
 - Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa Nurabelen

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
1.	Oktober	Kenakalan Remaja terkait Pengerusakan fasilitas umum (pengerusakan DPT Pemilihan Kepala Desa Periode 2019 – 2025)	Penyelesaian di Tingkat Desa dan pembinaan kepada pelaku oleh Babinsa Ile Bura. Kedua pelaku membuat pernyataan tertulis agar tindakan tersebut tidak terulang lagi.

BAB V

PENUTUP

Akhir kata semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kantor Camat Ile Bura ini dapat membantu pemerintah kabupaten nantinya dalam penyusunan laporan kepada Gubernur sesuai amanat Undang-Undang.

Sekian dan terima kasih.

Lewotobi, Januari 2020

Camat Ile Bura,

YAKOBUS ARA KIAN,S.Sos,M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19690214 199203 1 011

**LAPORAN KEGIATAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2019**

❖ **Merekap Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bulan Januari s.d. Bulan Desember 2019**

1. DESA RIANGBARING :

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa Riangbaring dari Bulan Januari s.d Desember 2019 adalah **0 kasus**, dengan rincian :

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
1.		-	-
TOTAL		-	-

Sumber : Seksi Trantib pada Kantor Camat Ile Bura Bulan Januari 2019

2. DESA LEWOAWANG :

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa Lewoawang Bulan Januari s.d. Desember 2019 adalah **0 kasus**, dengan rincian :

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
1.		-	-
TOTAL		-	-

Sumber : Seksi Trantib pada Kantor Camat Ile Bura Bulan Januari 2019

3. DESA LEWOTOBI :

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa Lewotobi Bulan Januari s.d. Desember 2019 adalah **0 kasus**, engan rincian :

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
1.		-	-
TOTAL		-	-

Sumber : Seksi Trantib pada Kantor Camat Ile Bura Bulan Januari 2019

4. DESA RIANG RITA

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa Riang Rita Bulan Januari s.d. Desember 2019 adalah **0 kasus**, dengan rincian :

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
1.	Januari	-	-
TOTAL		-	-

Sumber : Seksi Trantib pada Kantor Camat Ile Bura Bulan Januari 2019

5. DESA NURABELEN

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa Nurabelen Bulan Januari 2019 adalah **1 kasus**, dengan rincian :

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
1.	Oktober	Kenakalan Remaja terkait Pengerusakan fasilitas umum (pengerusakan DPT Pemilihan Kepala Desa Periode 2019 – 2025)	Penyelesaian di Tingkat Desa dan pembinaan kepada pelaku oleh Babinsa Ile Bura. Kedua pelaku membuat pernyataan tertulis agar tindakan tersebut tidak terulang lagi.
TOTAL		1	

Sumber : Seksi Trantib pada Kantor Camat Ile Bura Bulan Januari 2019

6. DESA NOBO

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa Nobo Bulan Januari s.d. Desember 2019 adalah **0 kasus**, dengan rincian :

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
1.		-	-

TOTAL	-	-
--------------	---	---

Sumber : Seksi Trantib pada Kantor Camat Ile Bura Bulan Januari 2019

7. DESA DULIPALI

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa Dulipali Bulan Januari s.d. Desember 2019 adalah **0 kasus**, dengan rincian :

No.	Bulan	Jenis Gangguan	Penyelesaian
1.		-	-
TOTAL		-	-

Sumber : Seksi Trantib pada Kantor Camat Ile Bura Bulan Januari 2019

★ Data Masalah Tanah dan Masalah Sosial Masyarakat lainnya

Data masalah tanah dan masalah sosial masyarakat lainnya serta penyelesaiannya yang terjadi pada Bulan Januari 2019.

Masalah Tanah

3. Masalah Hutan Adat Lewo di Desa Riangbaring

- ❖ Tahun 2013, Bartolomeus Baba Leba, dkk melakukan kegiatan penebangan pohon dan pembersihan lokasi mengakibatkan kerusakan hutan.

Alasan : Lokasi yang dibuka merupakan lokasi kampung lama.

- ❖ Sudah dilakukan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Desa pada Tahun 2013.

Berita Acara Hasil kesepakatan : Tidak boleh melakukan kegiatan lanjutan pada lokasi Hutan Adat Lewo, Lokasi yang sudah rusak dibiarkan untuk menjadi hutan kembali, akan dilakukan Seremoni Adat untuk pemulihan kembali Hutan Adat yang telah rusak

- ❖ Tanggal 26 Pebruari 2019, laporan dari Tuan Tanah Suku Leba Patilian dan Penguasa Hutan Adat (Suku Kwuta) tentang aktifitas di lokasi hutan adat(pengembalaan ternak kambing dan pembersihan).
- ❖ Tanggal 27 Pebruari 2019, Camat Ile Bura dan Kapospol Ile Bura, Pemerintah Desa, Tuan Tanah Suku Leba Patilian, Penguasa Hutan Adat (Suku Kwuta) bersepakat agar segera dilakukan peninjauan lokasi.
- ❖ Tanggal 28 Pebruari 2019, Kasi Trantib Umum, Kapospol Ile Bura, Pemerintah Desa dan Tuan Tanah melakukan peninjauan lokasi.

Hasil Tinjauan :lokasi yang dibersihkan berukuran 21 x 26m dan terdapat beberapa pohon pisang yang baru ditanam.

- ❖ Tanggal 05 Maret 2019, Camat Ile Bura, Kapospol Ile Bura, Kasi Trantib melakukan fasilitasi penyelesaian Hutan Adat Lewo.

Berita Acara Hasil kesepakatan :

13. Menginventarisir semua Hutan Adat yang ada di dalam Wilayah Desa Riangbaring.
14. Melakukan penetapan batas Hutan Adat dan ditutup.

15. Tidak diperkenankan siapapun dan dengan alasan apapun menebang, memungut hasil, memotong pohon pisang dan bambu di dalam Hutan Adat Lewo.
16. Pohon pisang, bambu, kemiri, mente, kakao, kopi, Pohon komoditi lainnya dan pohon buah - buahan yang ada di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dijadikan pohon hutan.
17. Tidak boleh melakukan penanaman pohon pisang, kemiri, mente, kakao, kopi, pohon komoditi lainnya dan pohon buah- buahan di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dan Hutan Adat lainnya.
18. Tidak boleh mengikat atau menggembalakan hewan ternak di dalam lokasi Hutan Adat Lewo dan Hutan Adat lainnya.
19. Kegiatan yang berkaitan dengan Seremonial Adat pada lokasi Hutan Adat agar terlebih dahulunya disampaikan kepada Tuan Tanah, Penguasa Hutan Adat, Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BPD untuk diketahui.
20. Penghijauan kembali Hutan Adat yang rusak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama.
21. Membangun kembali Rumah Adat pada tempatnya semula.
22. Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Adat agar segera melakukan rapat bersama dengan masyarakat untuk menyampaikan hasil kesepakatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hutan Adat Lewo dan membahas tentang Sangsi Adat dan Sangsi Pemerintah terhadap pelanggaran Hutan Adat yang ada di Wilayah Desa Riangbaring.
23. Sangsi Adat ditetapkan oleh Lembaga Adat dan Sangsi Pemerintah akan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
24. Apa bila terdapat pelanggaran pada lokasi Hutan Adat maka akan dikenakan Sangsi Adat dan Sangsi Pemerintah.

4. Masalah Tanah Suku Leba Demonlapan di Lokasi SDK Riangbaring

3. Penyelesaian di Tingkat Desa pada Bulan Desember 2019 yang difasilitasi oleh Camat Ile Bura bersama Pemerintah Desa Riangbaring.
4. Berita Acara penyelesaian :
 - Tanah Suku Leba diserahkan secara keseluruhan kepada Pemerintah Desa dengan catatan bahwa sebagian diserahkan ke SDK Riangbaring dan sebagian menjadi milik Desa.

Masalah Sosial Masyarakat lainnya

1. Masalah asusila (Masyarakat Desa Riang Rita)

- Masalah asusila terhadap anak di bawah umur oleh KG terhadap KW terjadi pada Bulan Januari 2019. Pihak keluarga sudah melaporkan masalah tersebut kepada Pemerintah Desa.
- Pemerintah Desa bersama pihak Keamanan sudah melakukan fasilitasi penyelesaian dengan menghadirkan pihak pelaku bersama keluarga dan pihak korban bersama keluarga.
- Kedua belah pihak bersepakat untuk damai dan selanjutnya masalah tersebut diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses.

- Pelaku sudah ditahan oleh Polsek Wulanggitang.

2. Masalah perselingkuhan(Masyarakat Dusun Lewouran,Desa Lewotobi)

- Hubungan perselingkuhan antara **Martha Wua Liwu(Asal Watobuku,Desa Waiula,Kec.Wulanggitang)** yang merupakan istri dari Turibius Demon Uran (Masyarakat Dusun Lewouran,Desa Lewotobi,Kec.Ile Bura) dengan **Oskar(Masyarakat Kokang, Desa Ojandetun)** terjadi sekitar Bulan September 2018.
- Martha dan Oskar sempat melarikan diri ke Samarinda,Kalimantan Timur. Kepergian Martha tidak sepengetahuan dengan suami Turibius Demon Uran.
- Kurang lebih tiga bulan Martha dan Oskar berada di Samarinda.
- Pada bulan Desember 2018 Martha dan Oskar kembali ke Desa Waiula dan Desa Ojandetun.
- Setelah mengetahui dengan jelas tentang hubungan perselingkuhan, keberadaan dan kondisi sang istri maka Turibius melaporkan masalah tersebut kepada Pemdes Lewotobi.
- Pemdes Lewotobi sudah mengeluarkan surat tertanggal 04 Januari 2019 yang ditujukan kepada Pemdes Ojandetun agar menghadirkan Martha dan Oskar pada Hari/Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019 untuk penyelesaian masalah tersebut.
- Namun sampai tanggal yang ditentukan, Martha dan Oskar tidak hadir.
- Langkah selanjutnya Pemdes Lewotobi sudah melaporkan persoalan ini ke kapospol Ile Bura dan sedang dalam proses pengumpulan keterangan di Kokang, Desa Ojandetun dan Watobuku, Desa Waiula.

3. Masalah Caci Maki (Masyarakat Desa Nurabelen)

- **Marta Bota Kolin sebagai (Pelapor)** melaporkan ke Pemerintah Desa bahwa dirinya dicaci maki oleh **Martina Lito Sarabiti (Terlapor) istri dari Yohanes Lera Kwuta** pada Hari/Tanggal: Senin, 02 September 2019 di Pasar Boru.
- Martina Lito Sarabiti marah karena mengetahui **hubungan gelap antara suaminya(Yohanes Lera Kwuta) dengan Marta Bota Kolin.**
- Hasil kesepakatan penyelesaian masalah tersebut yang tertuang dalam Berita Acara: Denda 1 (Satu) batang gading yang pantas dari Yohanes Lera Kwuta kepada Marta Bota Kolin dan Realisasinya terjadi pada Tanggal 20 Desember 2019.
- Sampai dengan tanggal dimaksud pihak Yohanes Lera Kwuta belum merealisasikan hasil kesepakatan tersebut.

4. Masalah Hak Karyawan PT.Tradisa Adipratama Putra yang terlambat dibayar oleh pihak perusahaan

- Manajer PT. Tradisa Adipratama Putra tidak berada ditempat (di perusahaan) sejak Tanggal 10 Januari 2019.

- Jumlah karyawan PT. Tradisa Adipratama Putra yang menjadi korban sebanyak 22 orang.
 - Upah para karyawan yang belum dibayar terhitung dari Bulan November s.d Desember 2019 dan THR.
 - Masalah tersebut sudah disampaikan ke Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan
- ★ Sesuai dengan uraian tugas yang diberikan, ada berbagai kegiatan koordinasi di Seksi Ketentraman dan ketertiban kecamatan selama tahun 2019 antara lain :
- Berkoordinasi dengan pihak Pospol Ile Bura dan Babinsa Ile Bura dalam penanganan masalah-masalah rawan sosial yang berkembang di masyarakat seperti perkelahian ,pemfitnaan dan masalah sosial lainnya.
 - Berkoordinasi dengan pihak Pospol Ile Bura dan Babinsa Ile Bura dalam perayaan Hari Besar Nasional (*Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia*, pengamanan perayaan Hari Besar Keagamaan yaitu Hari Tahun Baru dan Paskah di Gereja Riangbaring, Gereja Lewoawang, Kapela Buranilan, Gereja Lewouran, Gereja Lewotobi, Kapela Riangbunga, Gereja Riangkaha, Gereja Nurabelen dan Gereja Nobo.
 - Berkoordinasi dengan pihak Pospol Ile Bura dan Babinsa Ile Bura terkait keamanan dan ketentraman pada H-1 dan Hari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilpres,Pileg dan Pilkadaes.
 - Berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait perkembangan penyelesaian permasalahan di Tingkat RT, Dusun maupun Desa.
 - Berkoordinasi dengan desa-desa di sekitar lereng gunung lewotobi dalam mengatasi musibah kebakaran hutan dengan jalan membuat jebakan api agar api tidak meluas sampai ke areal perkebunan warga.

Kepala Seksi Trantib Umum,

Petrus Pajon Leba,S.Sos

NIP.19810315 201001 1 021

KELENGKAPAN DATA PENDUKUNG

PERANGKAT DAERAH : KANTOR CAMAT ILE BURA

LAMPIRAN IKK.III.

NO	JENIS DATA	KELENGKAPAN DATA	
		ADA	TIDAK
1.	Jumlah Program Nasional	-	✓
2.	Data Jumlah Program OPD	-	✓
3.	Standar Operating Procedure (SOP)	-	✓
4.	Perda Yang Dilaksanakan OPD	✓	-
5.	Data Nominatif PNS	✓	-
6.	Renstra OPD		
7.	Renja OPD	✓	-
8.	Foto copy RKA 2019 OPD (Formulir 2.2.)	✓	-
9.	Foto copy Program OPD yang ada dalam RKPD	-	✓
10.	Foto copy DPA 2019 OPD (Formulir 2.2.)	✓	-

11.	Laporan Realisasi Anggaran OPD (LRA)	✓	-
12.	Laporan Keuangan OPD	-	✓
13.	Neraca	-	✓
14.	CALK	-	✓
15.	Daftar Inventaris Barang Gabungan OPD	✓	-
16.	Foto Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil Keleiling, Pengumuman di Mass Media	✓	-
17.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik OPD	✓	-

DATA JUMLAH RUMAH

DI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN ILE BURA

No.	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Ket
1.	Nobo	381		
2.	Nurabelen	235		
3.	Riang Rita	167		
4.	Lewotobi	438		
5.	Lewoawang	374		
6.	Riangbaring	246		
7.	Dulipali	206		
Jumlah		2.047		

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : Flores Timur

NAMA SKPD : Kantor Camat Ile Bura

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang Prioritas

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Dokumen Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan(Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	0 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintahq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak -----yang terdiri dari: 1. SOP ttg ---- 2. SOP ttg ---- 3. SOP ttg ---- 4. Dst ----	0 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan	Tidak ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	Ada atau tidak jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional-----	Tidak ada	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Dokumen Pendukung
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	<ul style="list-style-type: none"> - PNS Perangkat daerah, sebanyak 14 personel - Total PNS Kabupaten sebanyak_personel %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim 2 Org - Pejabat yang ada sebanyak 9 Org 	22,22 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan 6 Org - Pejabat yang ada sebanyak 9 Org 	66,66 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Kebaradaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah <ul style="list-style-type: none"> - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD 	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada atau Tidak Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Kantor Camat Ile Bura 2017-2022 2. Renja Kantor Camat Ile Bura 3. RKA Kantor Camat Ile Bura 	3 Jenis dokumen	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKP	10	Jumlah program RKP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program RKP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak program 	0 %	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA	11	Jumlah Program Perangkat Daerah yang	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, 	0 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Dokumen Pendukung
		SKPD		diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	sebanyak ----- program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak-----program.		2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak program.	0 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 1.238.711.794 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.....	0 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.1.183.896.569 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.-----	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.401.004.205 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.183.896.569	33,87 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Dokumen Pendukung
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.782.892.364 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.183.896.569 	66,12 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ---- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Tidak Ada	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada, yaitu : 1. Buku Inventarisasi Barang Gabungan	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. --- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. -----. %	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan / dimanfaatkan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Dokumen Pendukung
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1 Jenis Fasilitas yaitu : 1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 Jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Camat Ile Bura	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.

LEEWOTOB, JANUARI 2020

CAMAT ILE BURA.

YAKOBUS ARA KIAN,S.Sos,M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19690214 199203 1 011

**RENCANA KERJA TAHUN 2019
DAN PROYEKSI MAJU RENCANA TAHUN 2019 KANTOR CAMAT ILE BURA**

KANTOR CAMAT ILE BURA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PROYEKSI RENCANA TAHUN 2020	MAJU
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan :	Wajib							
	Bidang	Fungsi Penunjang Prioritas							
	Urusan :								
1	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran						
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya urusan administrasi surat menyurat	Kantor Camat	80%	2,340,000		80%	2,574,000
	kegiatan	Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa langganan penggunaan air dan listrik untuk kantor camat dan rumah jabatan	Kantor Camat	80%	18,468,000		80%	20,314,800
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya dokumen perizinan untuk kendaraan dinas roda 2	Kantor Camat	80%	1,000,000		80%	1,100,000
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen administrasi keuangan dan barang, pelayanan kebutuhan kantor dan gaji	Kantor Camat	100%	17,455,000		80%	19,200,500
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kantor Camat	80%	3,780,425		80%	4,158,468
	Kegiatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang memadai	Kantor Camat	80%	27,524,325		80%	30,276,758
	Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tersedianya biaya penjilidan dan penggandaan	Kantor Camat	80%	12,193,500		80%	13,412,850
	Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terpenuhnya kebutuhan penerangan demi kelancaran kerja aparatur di kantor camat	Kantor Camat	80%	2,913,750		80%	3,205,125
	Kegiatan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Kantor Camat	80%	23,600,000		80%	25,960,000
	Kegiatan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi lintas sektor/instansi untuk sinergitas program/kegiatan	7 Desa, Larantuka dan Luar Daerah	80%	77,175,000		80%	84,892,500
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis kelancaran program dan kegiatan	Kantor Camat	80%	69,110,000		100%	76,021,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING	PROYEKSI RENCANA TAHUN 2020	MAJU
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur						
	Kegiatan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya meubelair dan peralatan rumah tangga kantor	Kantor Camat	100%	8,000,000		100%	8,800,000
	Kegiatan	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sound system dan personal komputer serta printer kantor	Kantor Camat	100%	34,800,000		100%	38,280,000
	Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Kantor Camat	80%	4,207,000		80%	4,627,700
	Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala untuk kendaraan dinas kantor	Kantor Camat	80%	16,730,000		80%	18,403,000
3	Program	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat	Terselenggaranya program kerjasama pembangunan						
	Kegiatan	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan	Kantor Camat	80%	35,642,875		80%	39,207,163
	Kegiatan	Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kemasyarakatan	Terlaksananya koordinasi untuk menjamin kamtibmas tingkat Kecamatan	Kantor Camat	80%	23,000,000		80%	25,300,000
	Kegiatan	Pendampingan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya dana monitoring pengelolaan keuangan desa	11 Desa	80%	23,640,000		80%	26,004,000
JUMLAH						401,579,875			

CAMAT ILE BURA

YAKOBUS ARA KIAN,S.Sos,M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19690214 199203 1 011